



DAMPAK COVID-19 TERHADAP PERBANKAN SERTA PERANAN HUKUM DALAM PEMULIHAN EKONOMI DI INDONESIA

Ajeng Kartini, Rani Apriani

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dampak dari pandemi Covid Infection 2019 (Coronavirus) antara lain melambatnya perkembangan moneter masyarakat, menurunnya pendapatan negara, dan membengkaknya belanja dan pembiayaan negara, sehingga diperlukan upaya yang berbeda oleh otoritas publik untuk menabung, kesejahteraan dan ekonomi publik, dengan penekanan pada pengeluaran untuk kesejahteraan, jaring jaminan sosial, serta pemulihan keuangan, termasuk untuk dunia bisnis dan jaringan yang terpengaruh. Untuk keadaan ini teknik ujian yang digunakan adalah dengan menggunakan metodologi yuridis standarisasi dengan mempertimbangkan berbagai landasan hukum dan tulisan yang berlaku. Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa untuk situasi ini, badan publik telah menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Batasan Sosial Cakupan Besar Terkait Peningkatan Kecepatan Penanganan Infeksi Covid (Virus Corona) dan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Dana Negara. dan Kestabilan Kerangka Moneter.

Kata Kunci : dampak Covid-19, Pandemi Covid-19, Perbankan.

PENDAHULUAN

Episode Coronavirus pertama kali dikenali di sekitar sana, Wilayah Hubei, Cina pada Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Asosiasi Kesejahteraan Dunia (WHO) pada 11 maret 2020. Infeksi Coronavirus atau Covid adalah sekelompok besar infeksi yang menyebabkan sedikit penyakit. Diantara-Nya adalah virus normal hingga infeksi yang lebih ekstrem seperti *Center East Respiratory Disorder (MERS-CoV)*, *Serious Intense Respiratory Condition (SARS CoV)*, hingga Coronavirus terbaru.²

Pada 02 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melaporkan menariknya dua pasien positif terinfeksi virus Corona. Kedua pasien tersebut adalah ibu dan anak yang terkait dengan tertular dari warga negara asing Jepang dan jumlah pasien positif terus bertambah, hingga 3 April 2020 terdapat 1.986 kasus positif Coronavirus di Indonesia. Hal ini jelas berdampak pada terhentinya perkembangan moneter publik, penurunan pendapatan negara, dan peningkatan pengeluaran dan pembiayaan negara. Konsekuensi dari pandemi

E-Mail : ajengkartini687@gmail.com

DOI : www.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2617-2625

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Vina Fadhotul Mukaromah, "Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, MERS, dan SARS?", tersedia dalam Kompas.com dapat diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-corona-yang-jadi-penyebab-penyakit-covid-19-mers-dan-sars>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Covid-19 atau yang disebut Coronavirus mempengaruhi memburuknya kerangka moneter seperti yang ditunjukkan oleh pengurangan dalam berbagai latihan moneter di dalam negeri sehingga harus saling diringankan oleh otoritas Publik dan kelompok Penasihat Kesehatan Kerangka Moneter (KSSK). untuk membuat gerakan melirik ke depan guna menjaga keamanan kawasan moneter.³

Seperti yang kita ketahui bersama, Covid-19 atau yang biasa disebut Coronavirus berubah menjadi Pandemi Sedunia. Pandemi Covid telah dilaporkan oleh WHO, *World Wellbeing Association on* pada tanggal 11 Maret 2020. Ini menyiratkan bahwa negara-negara di seluruh dunia harus mencegah dan mengelola Pandemi Covid ini. Lebih lanjut, otoritas publik menyikapi salah satunya dengan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Lingkup Besar Terkait Peningkatan Kecepatan Penanganan Infeksi Covid (Coronavirus). Berbagai negara menyelesaikan *Lockdown* dan PSBB sebagai salah satu sistem untuk keluar masuknya orang luar dan penghuni untuk membatasi atau menghambat perkembangan pandemi infeksi Coronavirus yang ditularkan oleh masyarakat, namun banyak juga yang tidak melakukan *lockdown*, setiap negara memiliki teknik tersendiri. Bagaimanapun, pelepasan otonom dan pemisahan fisik diselesaikan oleh konvensi kesejahteraan virus Corona yang diinformasikan oleh WHO dan telah menjadi konvensi global standar untuk mengelola penyebaran infeksi virus Corona yang telah pergi jauh karena tingkat keparahannya sendiri oleh perilaku manusia.

Perwakilan V Staf Resmi Republik Indonesia Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, otoritas publik tidak melakukan strategi *lockdown* karena telah mengubah berbagai bagian budaya Indonesia itu sendiri. Menurutnya, tidak semua negara akan membaik dan menang terkait penanganan kasus infeksi virus Corona ini dengan melakukan *lockdown*. Ia mencontohkan, India yang dinilai belum berhasil membuat *lockdown* menjadi jawaban terbaik untuk mengalahkan pandemi virus Corona yang melanda negaranya.⁴ Pusat untuk meruntuhkan masyarakat kelas dipandang paling terpengaruh oleh pandemi virus Corona saat ini. Karenanya, menyelamatkan nyawa sama pentingnya dengan menyelamatkan perekonomian. Beberapa wilayah, misalnya Tegal, secara efektif telah melakukan *lockdown*, namun secara kata-kata Indonesia tidak melihat *lockdown*, melainkan sebuah provinsi yang terisolasi, di mana perkiraan yang tepat harus diselesaikan. Semua wakil pemimpin telah dikumpulkan oleh pemimpin Republik Indonesia dan lebih menekankan pada melakukan penghapusan ramah karena mereka merasa bahwa individu memiliki pilihan untuk mencari kebutuhan mereka. Strategi isolasi lokal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang menunjukkan beberapa jenis isolasi seperti rumah, domain, rumah klinik kesehatan, dan batasan sosial yang sangat luas. Jaleswari mengatakan bahwa otoritas publik telah membuat langkah berbeda dalam UU isolasi Kesejahteraan, seperti penghapusan fisik, strategi *telecommute*, pencabutan PBB, dan pembatasan kelompok. Tidak menetapkan *lockdown* dan memusatkan perhatian pada isolasi provinsi, seperti ditunjukkan Jaleswari, itu bukan tanpa melihat berbagai macam komponen

³ Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

⁴ Ellyvon Pranita "Indonesia Tak Pilih Lockdown sebagai Solusi" tersedia dalam kompas.com diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/110000123/indonesia-tak-pilih-lockdown-sebagai-solusi-ini-alasannya>. diakses pada tanggal 16 April 2021.

yang berbeda di Indonesia selain menjaga stabilitas keuangan bagi pusat untuk menurunkan kelas beberapa aspek di Indonesia yang memengaruhi kebijakan tersebut:

1. Sudut pandang sosial-sosial Dalam perspektif sosial-sosial ini, merupakan informasi umum bahwa banyak lapisan masyarakat memiliki tingkat kontrol yang rendah, komunalisme yang tinggi, dan sebagian besar dikuasai oleh bidang keuangan.
2. Bagian dari wilayah Indonesia sebagai negara yang secara geologis dipandang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, memiliki banyak sekali jalan masuk umum, terutama pintu antrean yang melanggar hukum. Beberapa komunitas perkotaan masih menjadi pintu masuk untuk mengkoordinasikan lalu lintas ke negara-negara luar dan mulai dari satu pulau lalu ke pulau berikutnya.
3. Rencana pengeluaran Dalam mengelola penyebaran virus Corona, penting juga untuk bekerja sama dan mendistribusikan kembali rencana keuangan untuk mempercepat pengobatan virus Corona. Bagaimanapun, ada tiga pusat prinsip seputar latihan dan redistribusi pengeluaran, khususnya untuk menangani kesejahteraan, jaring jaminan sosial dan peningkatan bisnis, terutama untuk UMKM.

Strategi ini menyerupai angin sejuk bagi bank perkreditan atau bank biasa yang melakukan latihan perkreditan kepada masyarakat umum. Hal ini karena *credit unwinding* menyiratkan pengaturan kamar baik sesuai jadwal maupun pedoman terkait angsuran bunga obligasi. Pengaturan ini tertuang dalam pasal 2 PJOK yang menyatakan bahwa bank, bank perkreditan atau organisasi moneter dapat melakukan pendekatan ini untuk membantu peningkatan pembangunan keuangan kepada masyarakat pada umumnya (individu yang berhutang) yang terkena virus Corona.⁵

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap Perbankan?
2. Bagaimana Peranan Hukum Terhadap Pemulihan Ekonomi di Indonesia?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan ini antara lain:

1. Mengetahui dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap perbankan.
2. Mengetahui Peranan Hukum Terhadap Pemulihan Ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yang mengkaji isu hukum tentang pandemi covid-19 Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Materi resmi tambahan digunakan untuk mengingat berita dan artikel logis dan web, bahan-bahan

⁵ Dinda Azzahra Salsabila. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan". <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

penting dan legal tambahan kemudian diperiksa untuk menemukan hubungan dan kesamaan dengan rencana yang sulit. Strategi pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, penelitian ini dilakukan dengan melihat semua hukum dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah hukum dan pedoman yang diidentifikasi dengan masalah hukum yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perbankan

Dampak Covid atau Coronavirus terhadap perekonomian dunia semakin menekan. Banyak negara telah menerapkan pendekatan lockdown yang telah menghentikan berbagai latihan moneter. Hentikannya pergerakan finansial ini sangat menantikan episode Covid yang semakin cepat, khususnya di Eropa dan Amerika. Akibatnya, perkembangan keuangan dunia juga diperkirakan akan mengalami penghentian yang sangat tinggi.

Di negara-negara Asia Tenggara juga diperkirakan memiliki hal yang sama. JP Morgan mengatakan, perkembangan kredit dan penurunan pendapatan dan pembayaran non-premi bagi bank-bank di kawasan Asia Tenggara juga diperkirakan akan mengalami jeda. Fitch *Appraisals* menilai bank-bank di Thailand dan Singapura yang mengandalkan industri perjalanan kemungkinan akan paling terpengaruh oleh virus Corona. Ketergantungan Thailand pada industri perjalanan mempengaruhi kawasan UKM yang mewakili 33% dari portofolio kredit keuangan, kata Fitch. Sementara itu, bank-bank Singapura secara langsung dipengaruhi oleh Tiongkok karena 24% dari kredit mereka dialirkan ke berbagai organisasi Tiongkok. Dengan perkembangan moneter China yang menurun kembali ke 5,2 hingga 5,7 persen, kemungkinan bank-bank Singapura negatif. Sebagai catatan, China adalah negara tempat penyebaran virus Corona dimulai. "Potensi melemahkan kualitas dan manfaat sumber daya terjadi di bank-bank Singapura. Kalau episode itu berlarut-larut, maka bisa memengaruhi penilaian kepraktisan bank (VRs)," tulis Fitch.

"Kemungkinan evaluasi terhadap bank-bank di Vietnam masih belum pasti. Bagaimanapun, ini bisa berubah karena lama pengobatan virus Corona di negara itu," kata Fitch. Kemudian, norma-norma jaminan kredit bank dan modal keuangan Malaysia yang kokoh diantisipasi untuk membantu menahan efeknya. Coronavirus di industri keuangan Malaysia. Meskipun demikian, mengingat China adalah pasar tarif terbesar Malaysia, jeda tajam dalam perkembangan moneter China dapat membubarkan pendapatan perusahaan dan menurunkan peringkat kredit bank. Namun, dukungan modal yang dimiliki oleh bank-bank di kedua negara, seperti yang ditunjukkan oleh Fitch, akan cukup untuk bertahan. faktor mendesak yang terjadi, dengan catatan: efeknya bergantung pada penyebaran infeksi dan rentang waktu virus Corona telah menyerang kedua negara. Hal yang persis sama terjadi pada perbankan di Vietnam. Gaji yang berkurang dari industri perjalanan, rantai pasokan yang kacau dan bunga tarif yang melemahkan, pada umumnya akan menekan keuntungan perusahaan yang dengan demikian dapat membebani sifat sumber daya perbankan. Terlepas dari kenyataan bahwa area terkait industri perjalanan hanyalah sebagian kecil dari portofolio kredit yang diberikan oleh bank-bank Vietnam, industri keuangan Vietnam secara umum akan menghadapi penghentian dalam pengembangan kredit dan manfaat.

Hingga saat ini, BI telah memberikan pendekatan terkait uang yang berbeda mulai dari pemotongan biaya pinjaman, perantaraan tiga kali lipat, pemotongan menghemat prasyarat ke tingkat bersamaan untuk mempertahankan kerangka moneter negara dari setrum Covid. Seperti yang diindikasikan oleh Fitch, bank-bank Filipina dan Australia dapat menanggung dampak virus Corona. Ini karena ekonomi Filipina memiliki sedikit hubungan dengan China. Laporan Fitch menyebutkan, kontrak utang yang belum terbayar di Australia turun 1 premis *highlight* 1,06 persen pada kuartal terakhir 2019 dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pinjaman yang jatuh tempo pinjaman rumah sampai sekarang di bawah 1,2 persen selama 2,5 tahun terakhir. Biaya penginapan umum juga pulih dengan kenaikan 4,7 persen lebih dari seperempat tahun di delapan komunitas perkotaan penting di Australia. Hal ini membuat ketidak beruntungan dari tawaran properti di muka pada level yang rendah, terutama dengan adanya perlindungan uang muka penginapan. "Kebakaran hutan dan episode Coronavirus Covid di Cina dan negara-negara lain secara tidak signifikan memengaruhi portofolio kredit penginapan keuangan Australia," tulis Fitch. Kemudian lagi, pendapatan kawasan industri perjalanan Australia yang turun setelah pemberitahuan pergerakan tidak memengaruhi kredit bank.⁶ Bank Indonesia dalam dua bulan terakhir telah memberikan pendekatan terkait uang untuk membatasi dampak Covid terhadap perekonomian Indonesia untuk menjaga keamanan makroekonomi dan kerangka moneter. Pada saat itu, penurunan kebutuhan penahan rupiah sebesar 50 bps difokuskan pada bank-bank yang memimpin pelaksanaan pembiayaan tarif impor; dan mengembangkan jenis jaminan (dasar) pertukaran untuk pendukung keuangan asing untuk memberikan pilihan untuk memagari kepemilikan rupiah. Pelepasan tatanan keuangan diupayakan untuk melindungi perkembangan moneter Indonesia agar tetap fleksibel di tengah bahaya penundaan pemulihan ekonomi planet. Strategi ini juga bertujuan untuk memantau standar konversi Rupiah sesuai dengan nilai pentingnya, ditopang oleh pelaksanaan keseimbangan cicilan Indonesia secara terus menerus.

Tidak cukup dengan satu paket peningkatan, otoritas publik telah melanjutkan dengan peningkatan keuangan volume II, yang berisi pendekatan moneter dan non keuangan, pada dasarnya untuk membantu tindakan modern. Yang perlu diingat untuk paket pendorong moneter tersebut antara lain pengecualian dari perhitungan tahunan (PPh) 21 bagi tenaga kerja, penangguhan Pasal 22 Impor Pengeluaran Pribadi, dan penurunan Pasal 25 Tugas Pribadi Perusahaan sebesar 30%. Perpaduan antara money related dan strategi moneter dipercaya dapat menenangkan pelaku pasar, sehingga ketegangan di pasar moneter, pasar modal dan *genuine* area dapat mereda atau mereda.

Tawaran menawar saham dan Perlindungan Publik (SBN) terus berlanjut, memperbesar minat terhadap dolar AS, yang menyebabkan standar konversi rupiah terus melemah hingga mencapai Rp. 16.273 untuk setiap dolar AS (20 Maret 2020).⁷ Informasi tentang penyebaran Covid yang telah menyebar ke 166 negara dengan korban jiwa lebih dari 275.000 orang di samping pengaturan berbagai negara yang mengunci negaranya (lockdown), membuat pasar tidak yakin akan kondisi keuangan yang superior. Perbaikan ini menyebabkan kerentanan yang sangat tinggi dan menurunkan presentasi sektor bisnis

⁶ Dea Chadiza Syafina "Ketika Corona COVID-19 Menghantam Sektor Bank di Berbagai Negara" tersedia dalam <https://tirto.id/eE1H>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

⁷ Wahyu Ario Pratomo "bauran kebijakan melawan dampak covid-19" tersedia dalam <https://www.inews.id/news/nasional/bauran-kebijakan-melawan-dampak-covid-19/2>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

moneter di seluruh dunia, memfokuskan pada berbagai standar moneter dunia, dan memicu pembalikan uang ke sumber daya moneter yang dianggap terlindungi, terutama uang dan simpanan.

Menyikapi pencapaian pola kurang baik dalam situasi perekonomian, Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan *money related strategy* untuk menjaga kekokohan pasar uang dan kerangka moneter. Bank Indonesia memilih menurunkan BI 7-Day *Turn around Repo Rate* sebesar 25 bps menjadi 4,50%. Dalam mendukung upaya meringankan bahaya penyebaran Covid, Bank Indonesia menyusun strategi kerangka angsuran melalui aksesibilitas uang bersih sesuai arus dan mengajak masyarakat pada umumnya untuk lebih memanfaatkan pertukaran angsuran non tunai; mengurangi biaya Kerangka Kliring Umum Bank Indonesia (SKNBI) dari bank kepada Bank Indonesia dari Rp. 600 menjadi Rp1 dan dari nasabah ke bank dari Rp3.500 hingga yang terbesar dari Rp2.900; dan mendukung peruntukan aset nontunai untuk proyek-proyek pemerintah seperti Program Bantuan Sosial PKH, Program Kartu Pra Bisnis, dan Program Kartu Sekolah Cemerlang Indonesia.⁸Akibat buruk dari Coronavirus pada perbankan saat ini mulai mereda, *Store Protection Partnership* (LPS) mengatakan dampak buruk dari penyebaran Covid di bidang keuangan secara bertahap mulai menghilang, setelah terjadi pergantian toko dari kecil. bank ke bank besar. Dalam kurun waktu dari April hingga Juli, terjadi penurunan sifat aset pihak luar, yang banyak di antaranya berubah menjadi bank-bank besar, tidak hanya pada bulan Agustus dan September aset tersebut kembali ke bank-bank kecil juga dan bisnis keuangan seharusnya untuk dipersiapkan untuk kredit yang sesuai lagi sehingga di kuartal terakhir. masing-masing dari empat perekonomian akan meningkat.

Peranan Hukum Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia

Menetapkan PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Penyakit Covid 2019 (Coronavirus) telah dicanangkan oleh Asosiasi Kesejahteraan Dunia (WHO) sebagai pandemi sehingga penting untuk melakukan upaya agar tidak meluasnya kasus. Terkait upaya penanggulangan, *wellbeing isolate* dilakukan sesuai arahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Wellbeing Isolate*. Pelaksanaan *wellbeing isolate* merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk jaminan kesejahteraan umum dari penyakit dan / atau faktor bahaya kesejahteraan umum yang mungkin dapat menyebabkan krisis kesejahteraan umum. Isolasi kesehatan dilakukan dengan memperhatikan penyakit dan faktor bahaya kesehatan umum untuk transportasi, individu, produk, dan / atau iklim, seperti reaksi terhadap krisis kesehatan umum serta tindakan Isolasi Kesejahteraan. Salah satu tindakan isolasi kesejahteraan adalah sebagai batasan sosial yang sangat besar. Seperti yang tertuang dalam kata pengantar pemikiran tentang surat sebagai PP No. 21 Tahun 2020 tentang Batasan Sosial Lingkup Luar Biasa Berkaitan dengan Mempercepat Pengobatan Penyakit Covid 2019 (Coronavirus) bahwa penyebaran Covid Sickness 2019 (Coronavirus) dengan jumlah kasus dan / atau jumlah penyilaan telah meluas dan menyebar ke seluruh wilayah dan lintas negara dan mempengaruhi perspektif politik, keuangan, sosial, sosial, penjaga dan keamanan, seperti

⁸ Adhitya. "Dampak Covid-19 Pada Industri Perbankan di Setiap Segmen Berbeda".

https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Dampak_Covid_19_Pada_Industri_Perbankan_di_Setiap_Segmen_Berbeda&news_id=122172&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_gener al&q=,&halaman=1. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

halnya bantuan pemerintah dari individu-individu di Indonesia⁹. Dampak penyebaran *Covid Illness* 2019 (Coronavirus) telah menimbulkan kondisi tertentu sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi, salah satunya dengan mengambil batasan sosial yang sangat luas. Tindakan ini mengingat pembatasan aktivitas penghuni tertentu di ruang yang terkait dengan tertular *Covid Infection* 2019 (Coronavirus) mengingat pembatasan perkembangan individu dan / atau *merchandise* di wilayah atau wilayah / kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Covid Sickness* 2019 (Virus corona). Batasan-batasan ini dalam setiap kejadian dibawa melalui sekolah dan kunjungan kerja, batasan pada latihan yang ketat, dan / atau batasan pada latihan di siang hari bolong atau kantor. Dengan keterbatasan sosial ini diyakini akan mengurangi jumlah penyebaran virus Corona sehingga kondisi keuangan dapat kembali normal seperti semula.

Dalam Perppu 1 Tahun 2020 tentang Strategi Moneter Negara dan Pengamanan Kerangka Moneter Penanganan Pandemi *Covid Sickness* (Coronavirus) 2019 dan / atau tentang Menghadapi Bahaya yang Membebani Ekonomi Masyarakat dan / atau Kestabilan Kerangka Moneter, berbagai pengaturan diterima, untuk Misalnya, menetapkan pengeluaran ekstra dan subsidi untuk rencana Keuangan Negara 2020 untuk menangani Coronavirus. Oleh karena itu, otoritas publik telah mengeluarkan rencana keuangan sebesar Rp 450,1 triliun yang kemudian akan dialokasikan ke berbagai wilayah untuk menangani perpindahan dari sisi kesejahteraan ke dampak moneter berikutnya.

Otoritas publik juga memahami persyaratan untuk program pemulihan keuangan publik dengan memperluas batas pelaku bisnis di bidang keuangan dan murni. Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama nilai negara, situasi usaha pemerintah atau melalui plot penjaminan.

Selain itu, Perppu tersebut juga mengarahkan pendekatan kesehatan kerangka moneter untuk mengharapkan kerentanan kerangka ekonomi makro dan moneter. Dengan Perppu ini, otoritas publik bersama KSSK (Kelompok Pertimbangan Kesehatan Kerangka Kerja Moneter) dipercaya dapat melakukan koordinasi yang baik. Pengaturan dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 berdampak mental yang baik dan meningkatkan pemikiran positif masyarakat sekitar dan dunia usaha dalam menghadapi virus Corona. Perppu tersebut akan lebih berhasil jika juga dipersepsikan oleh Pemerintah Teritorial dan membuat pengaturan darurat sehingga cara yang diambil dalam menangani pasien dan memutus rantai virus Corona cepat dan tepat, bukan hal yang lama. Menariknya juga, aturan subsider Perppu harus diberikan secepatnya, tidak ada penyimpangan dari Perppu tersebut mengingat untuk pelaksanaannya.

Pandemi virus Corona di Indonesia berdampak pada kawasan moneter sehingga berdampak pada kondisi keuangan negara. Jasa Rekening sebagai suatu lembaga yang mengurus dana dan sumber daya bangsa dan sebagai sebuah keluarga, mempunyai satu visi dan satu kewajiban tetap, yaitu bersiap untuk menggelar perbaikan yang terjadi karena pandemi suatu ujian untuk mengimbangi dana dan sumber daya bangsa untuk kesuksesan terbaik masyarakat Indonesia.

⁹ PP No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PENUTUP

Kesimpulan

Langkah-langkah strategi BI telah dilakukan, misalnya, menurunkan suku bunga pendekatan, menyelesaikan skala tukar rupiah, memasukkan banyak likuiditas ke dalam rupiah dan likuiditas perdagangan asing, bekerja dengan aktivitas pasar mata uang dan pasar perdagangan asing di dalam dan luar negeri, melonggarkan pengaturan untuk pendukung keuangan asing dalam hal dukungan. Nilai dan posisi bersih perdagangan asing, memfasilitasi kehati-hatian skala besar untuk memberikan subsidi kepada eksportir, pedagang dan UMKM. Selain itu, dalam Kerangka Angsuran, BI memastikan aksesibilitas uang steril sesuai arus, dan memberdayakan pemanfaatan cicilan non tunai termasuk melalui perpanjangan masa legitimasi 0% MDR untuk QRIS dari Mei hingga September 2020, yang disepakati dengan ASPI dan PJSP.

Mengingat Bagian Undang-Undang tentang Penyembuhan Moneter di Indonesia awalnya memerintahkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Batasan Sosial Lingkup Besar, kegiatan ini mengingat pembatasan kegiatan tertentu penduduk pada suatu ruang yang terkait dengan tertular Covid Illness 2019 (Coronavirus) mengingat Keterbatasan pengembangan individu dan / atau barang dagangan untuk wilayah atau peraturan / kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid Sickness 2019 (Coronavirus). Batasan ini bagaimanapun juga terbantu melalui kunjungan sekolah dan kerja, pembatasan latihan ketat, dan / atau pembatasan latihan di tempat terbuka atau kantor. Dengan upaya tersebut diyakini dapat menurunkan jumlah penyebaran virus Corona dan memulihkan perekonomian di Indonesia. Kedua, Menetapkan perppu no. 1 Tahun 2020 tentang Strategi Moneter Negara dan Pengamanan Kerangka Moneter Penanganan Pandemi Covid Illness 2019 (Coronavirus) dan / atau Berkaitan dengan Menghadapi Bahaya yang Merusak Ekonomi Masyarakat dan / atau Kestabilan Kerangka Moneter. Strategi dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 memiliki dampak mental yang layak dan meningkatkan idealisme daerah dan dunia usaha dalam menghadapi virus Corona. Perppu tersebut akan lebih menarik jika dianggap juga oleh Pemerintah Wilayah dan membuat perangai darurat sehingga cara yang diambil dalam menangani pasien dan memutus rantai virus Corona cepat dan tepat, tidak sama. Lebih lanjut, yang menarik, pengaturan bawahan Perppu harus segera diberikan, tidak ada penyimpangan dari Perppu tersebut, mengingat pelaksanaannya.

Saran

1) Saran Untuk Pembaca

Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi Coronavirus, penyebaran Covid Illness 2019 (Coronavirus) dengan jumlah kasus dan / atau kuantitas penularan telah meluas dan telah menyebar ke seluruh kabupaten dan lintas negara dan mempengaruhi politik, keuangan, sosial, sosial. , sudut penjaga. Terlebih lagi, keamanan, sebagaimana bantuan pemerintah terhadap individu-individu di Indonesia. Otoritas publik dan fakultas klinis telah berjuang untuk mengelola masalah yang ada, tenaga kerja klinis dengan kapasitas mereka untuk membantu setiap korban dan otoritas publik dalam menyiapkan pendekatan yang diidentifikasi dengan Coronavirus, sebagai area lokal yang layak kami membantu negara dengan terus menjaga kesejahteraan dan kerapian dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh otoritas publik.

2) Saran Untuk Pemerintah

Untuk menjaga daya beli individu akibat macetnya keuangan, otoritas publik perlu memiliki opsi untuk mengurangi masalah pengeluaran yang secara langsung berada di bawah kendali otoritas publik, termasuk tugas-tugas esensial untuk listrik, bahan bakar, dan air bersih. Penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu menyulitkan dana BUMN dan BUMD.

Upaya otoritas publik untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah dengan memberikan Bantuan Uang Langsung (BLT) kepada individu yang mengalami penurunan gaji dan mengalami akhir bisnis, harus didukung oleh pendekatan untuk menjamin kelancaran persediaan dan peruntukan. barang dagangan, khususnya makanan. Peredaran BLT juga harus dibarengi dengan ketepatan informasi penerima bantuan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam penyebarannya sehingga cadangan BLT tidak hilang dan diketahui oleh setiap orang yang seharusnya mendapatkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adhitya. "Dampak Covid-19 Pada Industri Perbankan di Setiap Segmen Berbeda". https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Dampak_Covid_19_Pada_Industri_Perbankan_di_Setiap_Segmen_Berbeda&news_id=122172&group_news=IPOTNEWS&news_date=&taging_subtype=PG002&name=&search=y_general&q=&halaman=1. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Dea Chadiza Syafina "Ketika Corona COVID-19 Menghantam Sektor Bank di Berbagai Negara" tersedia dalam <https://tirto.id/eE1H>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Dinda Azzahra Salsabila. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasib Perbankan dan Bank Perkreditan". <https://yoursay.suara.com/news/2020/07/03/200710/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-nasib-perbankan-dan-bank-perkreditan>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Ellyvon Pranita "Indonesia Tak Pilih Lockdown sebagai Solusi" tersedia dalam [kompas.com](https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/110000123/indonesia-tak-pilih-lockdown-sebagai-solusi-ini-alasannya) diakses dari <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/02/110000123/indonesia-tak-pilih-lockdown-sebagai-solusi-ini-alasannya>. diakses pada tanggal 16 April 2021.

Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

PP No.21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Vina Fadhrotul Mukaromah, "Apa Itu Virus Corona, yang Jadi Penyebab Penyakit Covid-19, MERS, dan SARS?", tersedia dalam [Kompas.com](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-coronayang-jadi-penyakit-covid-19-mers-dan-sars) dapat diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/17/153000465/apa-itu-virus-coronayang-jadi-penyakit-covid-19-mers-dan-sars>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.

Wahyu Ario Pratomo "bauran kebijakan melawan dampak covid-19" tersedia dalam <https://www.inews.id/news/nasional/bauran-kebijakan-melawan-dampak-covid-19/2>. Diakses pada tanggal 16 April 2021.